**FUNGSI PENGAWASAN OLEH INSPEKTORAT DAERAH DALAM PELAPORAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA BERDASARKAN PERMENDAGRI NO 20 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOAAN KEUANGAN DESA DI HUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA**

**Wawan Kurniawan**

**NPM. 178040027**

**wawan@unpas.ac.id**

**Program Studi Magister Ilmu Hukum**

**Pascasarjana Universitas Pasundan**

 **ABSTRAK**

*Lemahnya pengawasan dan kurangnya peran lembaga pengawasan baik itu lembaga pengawasan yang ada di desa seperti BPD, LPM maupun lembaga pengawasan yang ada ditingkat kabupaten kota merupakan salah satu faktor mudahnya dana desa diselewengkan. Salahsatu kebijakan yang dilaksnakan oleh pemerintah , khususnya pemerintah daerah dengan melakukan pengawasan. Pengawasan merupakan fungsi manajemn yang harus dilaksnakan oleh suatu organisasi gara tujuan dari visi dan misi dapat tercapai. Fungsi -fungsi manajemen pemerintahan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi yang merupakan sarana yang harus ada dan dilaksanakan oleh manajemen secara profesional dan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien., berhasil tidak suatu fungsi di jalankan tergantung dari kesiapan aparatur, inspektorat daerah yang merupakan lembaga pengawasan yang ada dilingkungan pemerintahan yang memiliki fungsi pengawasan dan pembinaan di lingkungan pemerintahan daerah termasuk pelaksanaan pengawasan pemerintahan desa. Banyaknya permasalah terkait pengelolaan dana desa merupakan ketidak siapa pemerintah dalam mengantisipasi adanya penyelewengan dana desa. Inspektorat yang diharapkan sebagai warning sistem dan Quality Assurance tidak berjalan dengan baik.*

*Penelitian ini di lakukan dengan maksud untuk mengetahui fungsi pengawasan inspektorat dalam pelaporan pengelolaan dana desa berdasrkan permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keunagan Desa dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan untuk mengetahui tindak lanjut dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat serta untuk mengetahui perlindungan hukum bagi aparat pengawas.*

***Kata Kunci :Pengawasan, Inspektorat Daerah, Pengelolaan Keuangan Desa***

DAFTAR PUSTAKA

Adrian, S. (2010). *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: Sinar grafika.

Aloysius, R. (2016). Indonesia: Negara Hukum yang Berdasarkan Pancasila. Seminar Nasional Hukum.

Arif, Muhammad.2007. *Tata Cara Pengelolaan Keuangan Dana Desa Dan Pengelolaan Kekayaan Desa.*Pekanbaru:ReD Press

Arief Sidharta,, *Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum, dalam Jentera* (Jurnal Hukum), *Rule of Law* , Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PHSK), Jakarta, edisi 3 Tahun II, November 2004

B. Hestu Cipto Handoyo*, Otonomi daerah dan Titik Berat Urusan Rumah Tangga Daerah,* Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 1998

Berna Ermaya,Rendra P, *Kajian Naskah Akademik Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satpol PP Kota Bandung*, P3M Pascasarjana Unpas,2017

Hanif, Nurcholis. 2011, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta, Erlangga

Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011

Jimly Asyiddiqie, *Pengantar Hukum Tata Negara* Jilid ii, Sekertariat jendral dan kepanitraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006

Marbun, S. F. (2001). *Pembentukan, Pemberlakuan, Dan Peranan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Layak Dalam Menjelmakan Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih Di Indonesia*. Disertasi, Universitas Padjajaran Bandung.

Moh. Mahfud MD, 2000, *Demokrasi dan Konstitusi Indonesia :Studi Tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*, (Jakarta : Rineka Cipta)

Miriam Budiardjo, 2002, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta : Gramedia

Fuady, M. (2011). *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat*), cet. 2. Refika Aditama, Bandung.

M.Manullang, *Dasar-Dasar Manajemen*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995

Natsir, A. (1994). Pokok-Pokok Materi Pengawasan Aparatur Pemerintahan. Ujung Pandang.

Ni’matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa*, Setara Press, Malang ,2015

Parasong, M. A. T. (2014). Mencegah runtuhnya negara hukum. Grafindo Books Media.

Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta 2005

Philipus, M. (2005). Hadjon,[et., al.], *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1993).

Philipus, M. H. (1987). Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia. Bina Ilmu, Surabaya.

Ridwan HR *Hukum Administrasi Negara,* Raja Grafindo Persada cetakan ke 12 , Jakarta 2016

Ronny Hanitijo Soemitro, *Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990

SF Marbun dan Mahfud MD, Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara, Liberty, Yogyakarta , 2006

Siagian, S. P. (1984). *Proses Pengelolaan Pembangunan Nasional*. Gunung Agung

Sawyer, L. B. (1995). *An internal audit philosophy*. Internal Auditor, 52(4), 46-56.

Sri Soemantri, *Otonomi Daerah*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2014

Ruray, S. B. (2012). *Tanggung Jawab Hukum Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan & Pelenstarian Fungsi Lingkungan Hidup*. Bandung: Alumni.

Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Jakarta: Ichtiar, 1962

Wakhyudi, Ak., M.B.A, et al., Filosofi Auditing , (Jakarta, 2007),

Widjiastuti, A. (2016). *Peran Aaupb Dalam Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih Dan Bebas Dari Kkn*

Yusran Lapananda,*Hukum Pengelolahan Kuangan* Desa (Jakarta: Wahana Semesta Intermedia

PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

Undang-unadang nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

Undang-unadang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah

Undang-unadang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

Undang-unadang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-unadang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaman Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 241 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Dan Kabupaten/Kota

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

SUMBER LAIN

Soleh, C., & Rohmansjah, H. (2014). *Pengelolaan Keuangan Desa. Fokusmedia. Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan Pertama Edisi III,: Balai Pustaka Jakarta,)

Meri Yarni, Kosariza, Irwandi, *Pengawasan Dana Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia,* Jurnal Sains Sosio Humaniora Vol 3 No.2 2091

Jimly Asshiddiqie, Cita Negara Hukum Indonesia Kontemporer, Papper. Disampaikan dalam Wisuda Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, 23 Maret 2004 dalam Simbur Cahaya No. 25 Tahun IX Mei 2004 ISSN No. 14110-0614

Sawyer, Lawrence B. "An internal audit philosophy." Internal Auditor, vol. 52, no. 4, Aug. 1995, p. 46+. Gale Academic OneFile, Accessed 2 Aug. 2020.

Fransiska Tampanguma, Pengawasan Inspektorat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Minahasa Selatan, Jurnal Unsrat,Vol 3 (1), tahun 2013, hlm 5, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/governance/article/view/1555/12> 48 diakses,15 Agustus 2020

<https://inspektorat.ciamiskab.go.id> diakses 20 april 2020

<https://galuh.id/mantan-kepala-desa-di-ciamis-terjerat-tindak-pidana-korupsi/> diakses 16 September 2020 pukul 22. 20

[https://kemendagri.go.id/berita/baca/24751/keluarnya-pp-nomor-72-tahun-2019 untuk-penguatan-apip-yang-lebih-independen](https://kemendagri.go.id/berita/baca/24751/keluarnya-pp-nomor-72-tahun-2019%20untuk-penguatan-apip-yang-lebih-independen) diakses 20 april 2020